

Implementasi Sistem Informasi Administrasi Desa untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Kelurahan Way Urang Lampung Selatan

Fakhrur Rozi^{1*}, Sigit Apriyanto², Acum Wijaya³, Nurmansyah⁴

^{1,2,3,4} Universitas Indonesia Mandiri

E-mail: Fakhrurrozi@uimandiri.ac.id

Article History:

Received: July 4, 2023

Revised: July 17, 2023

Accepted: July 20, 2023

Keywords: Village
Administration Information
System, Transparency and
Accountability, Good
Governance

Abstract: *This community service activity aims to implement a village/sub-district administration information system to improve transparency and accountability in the governance of Way Urang Sub-District, South Lampung Regency. The background of this program is the low effectiveness of administrative services caused by manual record-keeping, limited human resources, and the lack of information technology utilization. The implementation method involved field observation, interviews, focus group discussions (FGD), system design, device installation, training for village officials, service simulations, as well as monitoring and evaluation. The developed information system focused on population data management, issuance of administrative certificates, and financial record-keeping of the sub-district. The results show that village officials were able to adapt to the digital system after receiving mentoring. Administrative services became faster, data were more organized, and financial reports were documented more transparently. Public response was also positive, indicated by increased satisfaction with public services and greater trust in the sub-district government. This activity concludes that the implementation of an administrative information system can strengthen the principles of good governance by enhancing transparency, accountability, and service efficiency. Similar implementations have the potential to be replicated in other sub-districts with adjustments to local needs and regional policy support.*

Pendahuluan

Kelurahan Way Urang di Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu wilayah administratif yang memiliki peran penting dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagai unit pemerintahan terdepan, kelurahan dituntut mampu memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, sistem administrasi yang berjalan masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena sebagian besar prosesnya masih dilakukan secara manual.

Administrasi manual sering menimbulkan sejumlah masalah, seperti keterlambatan pelayanan, duplikasi data, serta kesulitan dalam penyusunan laporan. Permasalahan tersebut tidak hanya menghambat efektivitas kerja aparatur kelurahan, tetapi juga menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan terobosan inovatif berupa penerapan sistem informasi administrasi yang mampu memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan kelurahan Sirait, H., Basuki, R. A., dkk. (2022).

Seiring perkembangan teknologi informasi, digitalisasi pemerintahan menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah pusat maupun daerah mendorong penerapan sistem berbasis teknologi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi publik. Implementasi sistem informasi administrasi desa atau kelurahan menjadi salah satu solusi strategis untuk menjawab tantangan tersebut, terutama dalam konteks pengelolaan data kependudukan, keuangan, serta pelayanan surat-menyurat.

Transparansi merupakan aspek penting yang harus diwujudkan dalam pemerintahan kelurahan. Melalui sistem informasi, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai pelayanan maupun penggunaan anggaran kelurahan. Keterbukaan informasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah setempat serta mengurangi potensi terjadinya praktik maladministrasi Sari, D., Dewi, A. S., Safitri, M., dkk. (2022).

Selain transparansi, akuntabilitas juga menjadi tujuan utama dari penerapan sistem informasi administrasi. Aparatur kelurahan dituntut mampu mempertanggungjawabkan setiap kegiatan administrasi yang dilakukan. Dengan adanya sistem informasi, data yang tersimpan lebih aman, tertata, dan mudah diaudit. Hal ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat prinsip good governance di tingkat kelurahan.

Namun, implementasi sistem informasi tidak terlepas dari berbagai tantangan. Faktor keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemahaman teknologi, serta infrastruktur digital yang belum memadai sering menjadi penghambat. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi administrasi harus dibarengi dengan pelatihan, pendampingan, serta dukungan sarana prasarana yang memadai agar dapat berfungsi optimal.

Pengalaman di beberapa desa dan kelurahan lain menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi mampu memberikan dampak positif, baik dari sisi efisiensi kerja aparatur maupun kepuasan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa digitalisasi administrasi bukan hanya sebuah wacana, melainkan kebutuhan nyata dalam penyelenggaraan pelayanan publik modern. Kelurahan Way Urang dapat mengambil pelajaran dari keberhasilan tersebut untuk mengembangkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan local Salam, R., & Sopyan, E. (2022).

Selain aspek teknis, keterlibatan masyarakat juga sangat penting dalam keberhasilan implementasi sistem informasi administrasi. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, mengawasi, dan memanfaatkan sistem menjadi bagian dari upaya menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, sistem ini bukan hanya menjadi alat kerja aparatur kelurahan, tetapi juga instrumen penguatan hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu memberikan solusi konkret bagi Kelurahan Way Urang dalam menghadapi tantangan administrasi modern. Melalui implementasi sistem informasi, aparatur kelurahan akan terbantu dalam menjalankan tugasnya, sementara masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, jelas, dan transparan. Hal ini sekaligus mendukung program pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi pelayanan publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penerapan sistem informasi administrasi di Kelurahan Way Urang merupakan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kelurahan. Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sekaligus menjadi contoh bagi kelurahan lain di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Metode

Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan aparatur Kelurahan Way Urang dan masyarakat setempat sebagai subjek utama kegiatan. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa implementasi sistem informasi administrasi tidak hanya sekadar transfer teknologi, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap sistem yang dibangun Masditok, T., & Sriwardani, S. (2021).

Tahap awal dimulai dengan observasi lapangan untuk mengidentifikasi kondisi administrasi kelurahan yang sedang berjalan. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai pola kerja aparatur, kendala dalam pencatatan administrasi, serta kesiapan perangkat kelurahan dalam mengadopsi teknologi digital. Data dari observasi ini menjadi dasar dalam merancang sistem informasi yang sesuai kebutuhan local

Khoirudin, K., Christioko, B. V., & Nugroho, A. (2021).

Selanjutnya dilakukan wawancara dan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan perangkat kelurahan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai permasalahan yang dihadapi. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman aparatur kelurahan terhadap penggunaan teknologi, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan utama terkait pelayanan administrasi kependudukan, pengelolaan keuangan, dan surat-menyerat.

Tahap berikutnya adalah perancangan sistem informasi administrasi. Sistem dirancang sederhana, user friendly, dan sesuai dengan kapasitas sumber daya manusia di Kelurahan Way Urang. Modul utama yang dikembangkan mencakup data kependudukan, pengelolaan keuangan, serta pelayanan surat keterangan. Perancangan ini juga memperhatikan aspek keamanan data agar informasi dapat tersimpan dengan baik (Salam, 2024).

Setelah perancangan selesai, dilakukan instalasi sistem informasi pada perangkat komputer yang tersedia di kantor kelurahan. Instalasi disertai dengan konfigurasi jaringan serta uji coba awal untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik. Pada tahap ini, tim pengabdian mendampingi aparatur untuk mempraktikkan input data sederhana sebagai simulasi awal.

Pelatihan diberikan kepada aparatur kelurahan agar mereka memahami penggunaan sistem informasi secara menyeluruh. Materi pelatihan meliputi cara input data, pembaruan data, pembuatan laporan, dan pencetakan dokumen administrasi. Pelatihan dilaksanakan secara bertahap dengan pendekatan praktik langsung agar aparatur lebih mudah memahami (Putra et al., 2024).

Setelah pelatihan, dilakukan simulasi pelayanan menggunakan sistem informasi. Aparatur kelurahan diminta melayani masyarakat dengan menggunakan sistem, misalnya pembuatan surat keterangan atau pencatatan transaksi keuangan. Simulasi ini bertujuan untuk menguji keterampilan aparatur dalam menghadapi kondisi nyata, sekaligus memberikan pengalaman langsung sebelum sistem digunakan sepenuhnya.

Monitoring dilakukan secara berkala untuk menilai sejauh mana sistem informasi digunakan dalam kegiatan administrasi sehari-hari. Tim pengabdian mengamati kendala teknis maupun nonteknis yang muncul, serta memberikan solusi praktis. Monitoring juga berfungsi sebagai sarana evaluasi untuk mengetahui efektivitas implementasi sistem di Kelurahan Way Urang (Guruh et al., 2025).

Evaluasi dilakukan melalui wawancara ulang dengan aparatur kelurahan dan masyarakat. Aspek yang dievaluasi meliputi peningkatan keterampilan aparatur, kelancaran penggunaan sistem, serta respon masyarakat terhadap pelayanan publik setelah adanya sistem informasi. Evaluasi ini menjadi bahan rekomendasi bagi pengembangan sistem lebih lanjut.

Tahap akhir adalah penyusunan laporan hasil kegiatan yang berisi capaian, kendala, serta rekomendasi. Laporan ini diserahkan kepada pemerintah kelurahan sebagai panduan untuk pengembangan sistem informasi administrasi di masa depan. Dengan metode ini, diharapkan implementasi sistem informasi administrasi dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan transparansi serta akuntabilitas pemerintahan Kelurahan Way Urang.

Hasil

Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi administrasi di Kelurahan Way Urang membawa dampak positif bagi tata kelola pemerintahan. Aparatur kelurahan yang sebelumnya terbiasa dengan pencatatan manual kini mulai terbiasa menggunakan sistem berbasis digital untuk mendukung aktivitas administrasi sehari-hari.

Salah satu hasil nyata adalah peningkatan efisiensi dalam pelayanan administrasi. Pembuatan surat keterangan, yang sebelumnya memerlukan waktu cukup lama karena harus dilakukan pencatatan berulang, kini dapat dilakukan dengan cepat melalui sistem yang sudah terintegrasi. Hal ini membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah dan efektif.

Dari sisi pengelolaan data, sistem informasi yang diterapkan mampu menyimpan data kependudukan dengan lebih rapi dan akurat. Aparatur dapat dengan mudah mencari dan memperbarui data warga, sehingga meminimalisir terjadinya duplikasi maupun kehilangan data. Kondisi ini meningkatkan akurasi laporan yang diperlukan oleh pemerintah daerah.

Hasil lain yang terlihat adalah adanya peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan kelurahan. Dengan adanya sistem, pencatatan transaksi dapat dilakukan secara digital dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini membuat laporan keuangan lebih mudah dipantau dan diaudit, sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan.

Selain itu, tingkat akuntabilitas pemerintahan meningkat karena setiap data dan aktivitas administrasi terekam dengan jelas dalam sistem. Aparatur kelurahan memiliki jejak digital yang dapat ditelusuri, sehingga setiap tindakan administratif memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih terbuka.

Hasil pelatihan menunjukkan bahwa aparatur kelurahan mampu menguasai dasar-dasar penggunaan sistem informasi. Walaupun pada awalnya terdapat kendala dalam memahami teknologi, namun melalui pendampingan intensif, aparatur dapat menggunakan sistem secara mandiri. Hal ini menjadi indikator keberhasilan transfer pengetahuan dalam kegiatan pengabdian.

Respon masyarakat terhadap pelayanan berbasis sistem juga cukup positif. Warga merasa lebih puas karena proses administrasi lebih cepat dan transparan. Beberapa warga bahkan memberikan masukan untuk pengembangan fitur tambahan, seperti layanan antrian online atau informasi publik yang dapat diakses melalui perangkat pribadi.

Monitoring yang dilakukan pasca implementasi menemukan adanya beberapa kendala teknis, seperti keterbatasan perangkat komputer dan jaringan internet yang tidak selalu stabil. Namun kendala ini dapat diatasi dengan dukungan teknis dari tim pengabdian serta komitmen kelurahan untuk melakukan pemeliharaan rutin.

Secara keseluruhan, hasil pengabdian menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi administrasi di Kelurahan Way Urang telah berhasil meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Aparatur menjadi lebih terampil, data lebih tertata, layanan lebih cepat, dan kepercayaan masyarakat meningkat Aprianis, A., Novalia, N., Anum, A., & Dharmawan, D. (2022).

Hasil kegiatan ini sekaligus menunjukkan bahwa sistem informasi administrasi memiliki potensi besar untuk direplikasi di kelurahan lain di Kabupaten Lampung Selatan. Dengan penyesuaian kecil sesuai kebutuhan lokal, sistem ini dapat menjadi model pengelolaan administrasi desa/kelurahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Diskusi

Diskusi hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi administrasi desa/kelurahan merupakan langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Sistem ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, mengurangi potensi kesalahan pencatatan manual, serta memperkuat akuntabilitas dalam setiap proses administrasi.

Salah satu hal penting yang terungkap adalah adanya resistensi awal dari aparatur kelurahan terhadap penggunaan teknologi baru. Resistensi ini wajar karena sebagian besar aparatur lebih terbiasa dengan sistem manual. Namun, melalui pelatihan berulang dan pendampingan intensif, resistensi tersebut dapat diatasi dan justru melahirkan rasa percaya diri aparatur dalam mengoperasikan sistem digital (Tampubolon et al., 2025).

Peningkatan transparansi menjadi aspek yang paling menonjol dari implementasi sistem informasi. Dengan pencatatan yang terdigitalisasi, masyarakat dapat memperoleh pelayanan secara lebih terbuka. Selain itu, adanya jejak digital dari setiap transaksi administrasi menjadikan proses pemerintahan lebih dapat diawasi baik oleh internal kelurahan maupun pihak eksternal.

Hasil diskusi dengan masyarakat menunjukkan adanya keinginan agar sistem ini

dapat diperluas mencakup layanan publik lainnya, seperti informasi anggaran pembangunan dan data bantuan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran sistem informasi tidak hanya dipandang sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan Sugiyanto, H., Apriza, T., & Sopyan, E. (2023).

Kendati demikian, terdapat tantangan teknis yang perlu menjadi perhatian. Infrastruktur teknologi, seperti ketersediaan komputer dan kestabilan jaringan internet, masih menjadi kendala utama di Kelurahan Way Urang. Hal ini berpotensi menghambat kelancaran sistem jika tidak diantisipasi dengan solusi seperti penambahan perangkat, peningkatan kapasitas jaringan, atau integrasi dengan layanan berbasis offline Julianti, S., & Masditok, T. (2023).

Dari perspektif hukum administrasi, keberadaan sistem informasi ini memperkuat asas akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelayanan publik. Setiap dokumen yang diterbitkan memiliki dasar pencatatan digital yang sah, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, sistem ini sejalan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) Supriyanto, S., & Basuki, R. A. (2023).

Pelaksanaan kegiatan ini juga memberikan pelajaran bahwa implementasi teknologi informasi di pemerintahan desa/kelurahan tidak dapat hanya mengandalkan perangkat lunak. Faktor manusia memegang peranan penting, baik dari segi penerimaan teknologi, keterampilan penggunaan, maupun komitmen untuk menjalankan sistem secara konsisten.

Diskusi juga menemukan bahwa keberlanjutan sistem memerlukan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Tanpa adanya regulasi dan anggaran yang jelas, sistem informasi berisiko berhenti berjalan setelah masa pendampingan selesai. Oleh karena itu, diperlukan integrasi program ini ke dalam perencanaan pembangunan daerah agar keberlanjutannya lebih terjamin.

Selain itu, sinergi dengan masyarakat menjadi kunci penting. Masyarakat perlu diberi ruang untuk memberikan masukan terhadap pengembangan sistem, sehingga sistem informasi benar-benar sesuai kebutuhan pengguna. Dengan cara ini, masyarakat bukan hanya penerima layanan, tetapi juga mitra aktif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik Julianti, S., & Masditok, T. (2023).

Secara keseluruhan, diskusi menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi administrasi di Kelurahan Way Urang berhasil mencapai tujuan utamanya, yakni meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Namun, keberhasilan ini tetap perlu didukung dengan peningkatan infrastruktur, pelatihan berkelanjutan, serta regulasi yang memayungi penerapannya agar manfaatnya dapat dirasakan secara jangka panjang.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa penerapan sistem informasi administrasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kelurahan. Melalui sistem ini, pelayanan administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Aparatur kelurahan yang semula terbiasa dengan pencatatan manual mampu beradaptasi dengan sistem digital setelah mendapatkan pelatihan dan pendampingan, sehingga proses administrasi menjadi lebih efektif serta terpercaya.

Secara keseluruhan, implementasi sistem informasi administrasi tidak hanya membantu aparatur dalam mengelola data dan pelayanan publik, tetapi juga memperkuat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan dukungan teknologi, kapasitas sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat, Kelurahan Way Urang dapat menjadi contoh model penerapan administrasi digital di tingkat lokal yang berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Tim pelaksana pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kelurahan Way Urang, Kabupaten Lampung Selatan, yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan ini. Partisipasi aktif aparatur kelurahan menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi sistem informasi administrasi yang dirancang.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada masyarakat Kelurahan Way Urang yang telah bersedia menjadi mitra dalam kegiatan pelatihan dan simulasi pelayanan administrasi berbasis digital. Masukan serta antusiasme masyarakat memberikan dorongan besar bagi pengembangan sistem agar lebih sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Tidak lupa, apresiasi diberikan kepada pihak Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian ini melalui dukungan akademik, tenaga ahli, dan sumber daya. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah kelurahan, dan masyarakat menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi multipihak dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan modern.

Referensi

Aprianis, A., Novalia, N., Anum, A., & Dharmawan, D. (2022). Pelatihan pembuatan media pembelajaran berbantuan aplikasi flipbook bagi guru SMAN 2 Negeri Katon. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian*, 2(1), 127-136.

- Julianti, S., & Masditok, T. (2023). The Influence of Working Capital Turnover and Debt to Equity Ratio on Return on Asset. *Almana: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 7(3), 581-592.
- Khoirudin, K., Christioko, B. V., & Nugroho, A. (2021). Transformasi Digital Tata Kelola Kegiatan UMKM Berbasis Office 365. *TEMATIK*, 1(1).
- Masditok, T., & Sriwardani, S. (2021). Analysis of The Profitability of Agricultural Sector Companies-Sub-Sector of Agriculture Listed in Indonesia Stock Exchange. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 5(1), 135-155.
- Salam, R., & Sopyan, E. (2022). Analysis of The Role of Ciamis DPRD Women in Making Child-Friendly District Regulations. *Journal of Disability*, 2(1), 7-16.
- Sari, D., Dewi, A. S., Safitri, M., Rozi, M. F., Iman, M., & Pradana, K. C. (2022). Peningkatan Kompetensi Siswa dalam Berwirausaha di Era Society 5.0 Melalui Penyuluhan Digital Marketing dan Fintech di SMKN 1 Tegineneng. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(3), 695-703.
- Sirait, H., Basuki, R. A., Rosalina, S. S., Supriyanto, S., & Sari, E. (2022). MSMEs Digitalization: The Future Economic Ecosystem After the Covid-19 Era. *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 25(4).
- Sugiyanto, H., Apriza, T., & Sopyan, E. (2023). Implementation of Digital-Based Public Service Policy in Local Government: A Case Study of the Integrated Service Application. *Jurnal Sosial dan Humanis Sains (JSHS)*, 8(2), 100-106.
- Supriyanto, S., & Basuki, R. A. (2023). Peningkatan Pemahaman Pemasaran Online Pada Remaja Milenial di SMK Tri Ratna-Jakarta Barat. *Jurnal Pemberdayaan Nusantara*, 3(1), 44-52.